

## **Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar**

**Punirah**

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

Email: [asiap7378@gmail.com](mailto:asiap7378@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran merupakan suatu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim global, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada wilayah gambut yang rentan terhadap kebakaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna lahan, dilengkapi dengan observasi lapangan dan kajian dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam pengawasan dan pelaksanaan praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Namun, implementasi pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak pembakaran, hambatan teknis dalam pengelolaan lahan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pendampingan teknis, serta pemberian insentif ekonomi sangat diperlukan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan pembakaran lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan kebijakan yang memadai, pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Lahan Gambut, Pembakaran Lahan, Partisipasi Masyarakat

**Abstract:** This study aims to examine the role of government and community participation in peatland management without burning. Peatland management without burning is an important effort in maintaining ecosystem sustainability and preventing fires that have broad impacts on the environment, public health, and global climate change, as well as identifying obstacles faced during the implementation process in the field. The method used is a qualitative approach with case studies in peat areas that are vulnerable to fire. Data collection was carried out through in-depth interviews with government officials, community leaders, and land users, supplemented by field observations and studies of related policy documents. The results of the study indicate that the government plays a central role in formulating policies, allocating resources, and supervising and enforcing the law on land burning practices. On the other hand, community participation is very important for the success of the program, especially in supervising and implementing environmentally friendly land management practices. However, the implementation of peatland management without burning faces various obstacles, including budget constraints, low public understanding of the impacts of burning, technical obstacles in land management, and less than optimal coordination between related institutions. Therefore, increasing community capacity through environmental education, technical assistance, and providing economic incentives is very necessary. In addition, strict law enforcement and a participatory approach involving traditional leaders and local communities are key to changing land burning habits. The conclusion of this study is that peatland management without burning requires close cooperation between the government, the community, and other related parties. With strong synergy between the government and the community and adequate policy support, peatland management without burning can be carried out effectively and sustainably.

**Keywords:** Peatland Management, Land Burning, Community Participation

*Article History :*

*Received 08-06-2025; Revised 20-06-2025; Accepted 23-07-2025*

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas tentang penerapan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar di Kabupaten Kubu Raya dan menganalisis persepsi petani. Untuk menjaga ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, menekankan perlunya peningkatan sosialisasi pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan dan produktif.

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dimana lebih fokus pada peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, dilakukan di daerah yang masih memiliki tantangan dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Dalam menganalisis peran pemerintah dan masyarakat memiliki kebaruan dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar secara komprehensif. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian lainnya dan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Pada penelitian ini juga memiliki keistimewaan tersendiri didalamnya, dalam teknik pengelolaan lahan tanpa bakar dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan gambut dan mengurangi resiko kebakaran hutan. Tantangan dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola lahan gambut tanpa bakar. Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar.

Lahan gambut merupakan salah satu kekayaan ekologis yang sangat berharga bagi Indonesia, baik dari sisi fungsi ekologis, ekonomis, maupun sosial budaya. Ekosistem gambut memiliki kemampuan luar biasa dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga perannya sangat krusial dalam mitigasi perubahan iklim global. Selain itu, lahan gambut juga mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, lahan gambut mengalami tekanan luar biasa akibat alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, dan pembukaan lahan secara tidak ramah lingkungan, terutama dengan cara dibakar. Praktik pembakaran ini telah menyebabkan bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang setiap tahun, menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, dan mencemari udara hingga lintas negara. Oleh karena itu, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan tanpa pembakaran menjadi keharusan yang mendesak untuk mencegah degradasi lingkungan yang lebih luas.

Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, dan kesadaran masyarakat. Penggunaan metode pembakaran lahan masih dianggap sebagai cara termudah, tercepat, dan termurah untuk membuka lahan, terutama oleh petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi alternatif. Ketika kebijakan pemerintah melarang pembakaran tanpa memberikan alternatif yang realistis, masyarakat seringkali merasa terpinggirkan dan mengalami tekanan. Inilah yang menjadikan persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pengelolaan lahan gambut harus mempertimbangkan pendekatan yang integratif dan partisipatif, di mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dalam satu kerangka kebijakan yang adil, realistis, dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dengan memperhatikan kondisi lapangan secara konkret.

Peran pemerintah sangat vital dalam mengarahkan dan mengatur tata kelola lahan gambut agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam menyusun regulasi, menyelenggarakan program restorasi, menyediakan teknologi alternatif, serta melakukan pengawasan secara konsisten. Salah satu upaya nyata pemerintah adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang bertugas untuk mempercepat proses restorasi lahan gambut melalui pendekatan teknis, sosial, dan ekonomi. Pemerintah juga berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), serta menetapkan kawasan fungsi lindung dan budidaya

gambut. Namun, semua kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila tidak disosialisasikan secara menyeluruh dan diterjemahkan dalam bentuk program konkret yang bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat lokal yang menjadi pelaku utama pengelolaan lahan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat memegang peran yang tidak kalah penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan lahan gambut. Masyarakat adat, petani lokal, dan komunitas desa gambut adalah aktor-aktor utama yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan yang bersifat top-down tanpa melibatkan mereka akan berujung pada kegagalan implementasi. Pendekatan partisipatif yang mengedepankan dialog, pemberdayaan, dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengelolaan gambut. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebakaran lahan, pelatihan pertanian tanpa bakar, serta pemberdayaan ekonomi berbasis produk gambut lestari seperti madu, ikan, dan tanaman obat, dapat menjadi alternatif solusi yang realistis dan memberi nilai tambah ekonomi.

Pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mendukung pengelolaan gambut tanpa bakar. Banyak masyarakat yang melakukan pembakaran bukan karena niat merusak lingkungan, tetapi karena ketidaktahuan akan dampaknya dan ketiadaan alternatif yang lebih baik. Oleh karena itu, edukasi melalui pendekatan budaya lokal, sekolah lapang, dan pendampingan teknis menjadi sangat diperlukan. Selain itu, penguatan kelembagaan lokal seperti kelompok tani, kelompok usaha masyarakat, dan lembaga adat dapat menjadi saluran strategis dalam menyebarkan pengetahuan dan membangun komitmen kolektif dalam menjaga gambut. Ketika masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari tidak membakar lahan serta mendapatkan keuntungan ekonomi dari praktik ramah lingkungan, maka mereka akan dengan sendirinya menjadi pelindung ekosistem gambut yang tangguh.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional perlu dibangun secara kuat dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan inovasi yang lebih efektif untuk menjawab kompleksitas pengelolaan gambut. Pemerintah dapat menggandeng LSM lingkungan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, akademisi untuk riset dan teknologi tepat guna, serta sektor swasta untuk membangun rantai nilai yang berkelanjutan dan berbasis pasar. Kerangka kerja kolaboratif ini juga penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta mendorong adopsi standar keberlanjutan dalam praktik ekonomi berbasis lahan gambut. Dalam konteks global, dukungan internasional dalam bentuk dana perubahan iklim dan transfer teknologi juga dapat menjadi pendorong penting dalam mendukung upaya nasional pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan adil.

Dengan demikian, pengelolaan lahan gambut tanpa bakar merupakan sebuah proses transformasi sosial-ekologis yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan harus mampu bersinergi dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemilik pengetahuan lokal. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan teknis, tetapi juga diperlukan pendekatan sosial dan kultural yang menghargai keberagaman perspektif lokal. Keberhasilan pengelolaan gambut tanpa bakar akan menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam menjaga lingkungan, mewujudkan keadilan sosial, serta berkontribusi nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Untuk itu, dibutuhkan komitmen jangka panjang, kesungguhan politik, serta semangat kolaborasi yang kuat untuk menciptakan sistem pengelolaan lahan gambut yang lestari dan berkelanjutan.

## **Partisipasi**

Teori partisipasi memainkan peran penting dalam proses pembangunan, khususnya di tingkat lokal seperti desa. Salah satu tokoh sentral, Sherry R. Arnstein (1969), melalui artikelnya "*A Ladder of Citizen Participation*", mengkategorikan partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkat, dari yang manipulatif hingga pengendalian penuh oleh warga. Menurutnya, partisipasi sejati hanya tercapai jika warga memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan publik. Jules Pretty (1995) kemudian mengembangkan *Typology of Participation* yang menilai keterlibatan masyarakat berdasarkan derajatnya, mulai dari mobilisasi pasif hingga partisipasi otonom (self-mobilization). Dalam praktiknya, banyak program pembangunan gagal karena hanya melibatkan warga pada tingkat informasi atau konsultasi, bukan pada pengambilan keputusan.

Robert Chambers (1997), pelopor metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, menekankan bahwa pembangunan yang partisipatif harus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan dan merancang solusi berdasarkan realitas lokal mereka. Chambers beranggapan bahwa partisipasi bukanlah alat teknis, melainkan pendekatan etis yang menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Cohen dan Uphoff (1980) menegaskan bahwa partisipasi harus terjadi dalam empat tahap: pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi hasil. Namun, partisipasi yang tinggi tidak otomatis terjadi tanpa adanya institusi lokal yang kuat. Norman Uphoff (1985) menambahkan bahwa keberlanjutan partisipasi sangat tergantung pada penguatan kelembagaan lokal, yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi warga.

Menggunakan teori implementasi Edward III (1980), keberhasilan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi antara pemerintah dan warga, tersedianya sumber daya (termasuk pelatihan bagi masyarakat), sikap aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Di banyak desa, partisipasi macet karena struktur implementasi program masih top-down, tidak memberi ruang bagi warga untuk merancang atau mengevaluasi kebijakan. Teori Elmore (1980) tentang *bottom-up implementation* lebih sesuai untuk konteks partisipatif, di mana aktor lokal seperti perangkat desa dan tokoh masyarakat dapat menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi sosial dan kultural setempat. Implementasi partisipasi tidak cukup hanya dalam bentuk prosedur, tetapi harus disertai pergeseran kekuasaan, transparansi informasi, dan penguatan kapasitas lokal.

## **Pembangunan**

Pembangunan, secara teoritis, telah mengalami pergeseran paradigma dari pertumbuhan ekonomi semata menuju pendekatan yang lebih multidimensional. Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menyatakan bahwa pembangunan adalah perluasan kebebasan substantif bagi manusia, seperti kebebasan politik, akses pendidikan, dan keamanan ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, pendekatan ini menuntut agar program pembangunan tidak hanya bersifat fisik seperti infrastruktur, tetapi juga memberi ruang pada pemberdayaan dan keadilan sosial. Michael Todaro dan Stephen Smith dalam *Economic Development* menekankan bahwa pembangunan sejati adalah proses transformasi struktural yang mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, Michael P. Todaro melalui model *dual economy* menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara sektor modern dan tradisional. Dalam konteks Indonesia, desa sering kali berada dalam posisi marginal, tertinggal dalam distribusi sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa seperti Dana Desa bertujuan untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada bagaimana implementasinya dilaksanakan. Apabila hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan pembangunan manusia dan sosial, maka tujuan jangka panjang pembangunan tidak akan tercapai.

Menurut teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983), pembangunan akan efektif jika tujuan kebijakan jelas, indikatornya terukur, serta terdapat dukungan politik dan administratif dari tingkat bawah hingga atas. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan pembangunan desa sering kali terhambat oleh lemahnya kapasitas aparat desa, kurangnya pengawasan, atau tidak sinkronnya antara rencana pembangunan dan kebutuhan lokal. Teori bottom-up implementation ala Elmore kembali relevan di sini, karena pembangunan desa seharusnya dirancang dan diprioritaskan oleh masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata berdasarkan program dari pusat. Implementasi pembangunan yang partisipatif dan adaptif akan lebih efektif karena memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kapasitas lokal.

## **Desa**

Konsep desa dalam kebudayaan Nusantara telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk. Secara etimologis, desa berasal dari kata Sanskerta *dhesa*, yang merujuk pada wilayah atau tempat tinggal. Desa adalah entitas sosial yang memiliki sistem nilai, hukum adat, dan mekanisme gotong royong yang kuat. Di masa pra-kolonial, desa memiliki otonomi dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan desa yang tidak sekadar memindahkan model pembangunan kota ke desa, tetapi menghargai kearifan lokal yang telah

lama berakar. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan struktur sosial dan budaya desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokal berdasarkan hak asal usul. UU ini merupakan landasan kuat bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Peraturan pelaksana seperti Permendes PDPTT No. 21 Tahun 2020 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa, pengelolaan Dana Desa, dan pelaporan hasil pembangunan. Secara formal, desa memiliki kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai kanal partisipasi warga.

Namun, dalam implementasinya, banyak tantangan yang muncul. Mengacu pada teori implementasi Edward III, kendala komunikasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan lemahnya struktur birokrasi desa dapat menghambat efektivitas pengelolaan kebijakan desa. Selain itu, Mazmanian dan Sabatier menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara rancangan kebijakan pusat dan konteks lokal bisa menjadi batu sandungan implementasi. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up implementation menjadi kunci dalam pembangunan desa. Dalam pendekatan ini, warga dan pemerintah desa memiliki ruang besar untuk menyesuaikan kebijakan pusat agar relevan dan berdampak langsung pada masyarakat desa, sesuai dengan semangat UU Desa yang mendorong kemandirian dan partisipasi aktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta pelaku utama pengelolaan lahan gambut di lapangan. Selain itu, penelitian juga melibatkan observasi partisipatif dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan resmi, serta publikasi terkait pengelolaan gambut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi dinamika pengelolaan lahan gambut secara lebih komprehensif dan holistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, dimana data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang ada untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap selama periode penelitian berlangsung agar perubahan kondisi lapangan dapat diikuti secara langsung. Dalam tahap analisis, peneliti menafsirkan data secara kritis dengan mengacu pada kerangka teori yang sudah dikaji sebelumnya, sehingga hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah**

Di Kabupaten Kubu Raya pemerintah setempat telah mengusulkan para petani padi di daerah rawan kebakaran untuk menerapkan cara efektif supaya membuka lahan tanpa membakar, adapun teknik yang sering digunakan oleh masyarakat setempat adalah dengan menggunakan mesin penggembur tanah dan mulsa. Mulsa adalah bahan yang digunakan untuk menutupi permukaan tanah dengan tujuan untuk mengendalikan gulma, mempertahankan kelembaban tanah, dan mengatur suhu tanah. Proses penggunaan mulsa, para petani padi memilih bahan mulsa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti jerami padi atau tanaman lainnya. Setelah panen para petani padi menutupi permukaan tanah dengan mulsa, sehingga tanah terlindung dari sinar matahari langsung dan kelembaban tanah dapat dipertahankan. Mulsa membantu mengendalikan gulma dengan menutupi permukaan tanah dan mencegah gulma tumbuh. Para petani padi memelihara mulsa dengan memastikan bahwa mulsa tetap

kering dan tidak terlalu tebal, sehingga dapat efektif dalam mencegah kebakaran. Dengan ini masyarakat membantu peran pemerintah dalam pengelolaan lahan.

Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan upaya konservasi dan pelestarian ekosistem gambut. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan tegas agar pengelolaan lahan gambut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan rancangan peraturan, konsultasi publik, hingga pengesahan regulasi yang kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Kebijakan yang dirancang tidak hanya harus mengatur larangan pembakaran, tetapi juga menyediakan solusi alternatif dan insentif bagi masyarakat agar beralih ke praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan lahan gambut, pemerintah pusat seringkali mengeluarkan kebijakan strategis yang bersifat makro, seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dan Instruksi Presiden terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional. Selain itu, pemerintah juga menetapkan zona-zona fungsi gambut yang mengatur kawasan mana yang boleh dikembangkan dan mana yang harus dilindungi secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang harus berjalan selaras tanpa tumpang tindih kewenangan.

Implementasi kebijakan di tingkat daerah merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah karena harus berhadapan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang beragam. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengadaptasi kebijakan nasional agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Mereka bertugas menyosialisasikan aturan, mengawasi aktivitas pembukaan lahan, serta mengelola konflik yang mungkin timbul antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di banyak daerah gambut, peran pemerintah daerah juga diharapkan untuk mendorong inovasi teknologi pertanian tanpa bakar serta menyediakan dukungan modal dan pelatihan bagi petani agar dapat beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Selain fungsi regulasi dan pengawasan, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam menggalang partisipasi masyarakat dan berbagai pihak terkait. Dalam kebijakan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan secara konsisten. Pemerintah menyediakan mekanisme partisipasi melalui forum konsultasi publik, pelatihan teknis, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi. Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan gambut serta memberikan mereka alternatif penghidupan yang tidak merusak lingkungan, sehingga pembakaran lahan tidak lagi menjadi pilihan utama.

Namun, di lapangan seringkali ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Salah satu tantangan terbesar adalah masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik di pemerintahan maupun masyarakat lokal, dalam menerapkan teknologi dan praktik pengelolaan lahan tanpa bakar. Selain itu, ketidakjelasan hak atas lahan dan konflik agraria sering kali memicu tindakan pembakaran sebagai bentuk perselisihan atau usaha membuka lahan secara cepat dan murah. Faktor ekonomi juga menjadi penghambat ketika masyarakat tidak mendapatkan insentif yang memadai untuk beralih dari metode tradisional yang merusak ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan dan program yang terintegrasi sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan lahan gambut tanpa pembakaran. Pemerintah membentuk badan khusus seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang bertugas mengkoordinasikan upaya restorasi lahan gambut secara nasional. Badan ini tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik lahan, tetapi juga membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat adat. Melalui kelembagaan ini, pemerintah dapat mengelola sumber daya dan informasi secara lebih efektif, memantau dampak kebijakan, serta memastikan adanya evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan program pengelolaan lahan gambut.

Pemerintah juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dan donor yang memberikan dukungan dana, teknologi, dan pengetahuan untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Dalam menghadapi isu global perubahan iklim, pengelolaan gambut tanpa pembakaran menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang luas terhadap emisi karbon. Pemerintah Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial yang kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Kerja sama ini menjadi salah satu modal penting agar upaya pengelolaan gambut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran sangat strategis dan multidimensional. Kebijakan yang dirancang harus komprehensif dan adaptif terhadap dinamika lokal, sementara pelaksanaan di lapangan membutuhkan koordinasi yang solid antar lembaga serta keterlibatan aktif masyarakat. Dukungan dari sisi kelembagaan, teknologi, dan kerja sama internasional menjadi pelengkap agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen politik dan keberlanjutan program menjadi faktor penentu utama dalam mewujudkan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran yang efektif dan berkelanjutan.

### **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lahan gambut sebagai ekosistem yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kesadaran ini biasanya tumbuh dari edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok komunitas lokal. Masyarakat yang memahami konsekuensi buruk dari pembakaran lahan gambut, seperti kebakaran besar, polusi udara, dan kerusakan habitat, cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lahan tanpa bakar.

Faktor ekonomi juga menjadi penentu besar dalam partisipasi masyarakat. Lahan gambut seringkali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Namun, metode tradisional pembukaan lahan dengan cara dibakar dianggap lebih murah dan cepat dibandingkan metode alternatif yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak memperoleh insentif ekonomi yang memadai atau akses terhadap teknologi dan modal untuk pengelolaan lahan tanpa bakar, tingkat partisipasi mereka cenderung rendah. Ketersediaan program dukungan dari pemerintah atau lembaga lain, seperti pelatihan pertanian berkelanjutan dan bantuan alat mekanis, sangat berpengaruh dalam mendorong masyarakat beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, norma dan budaya lokal juga memainkan peran penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Dalam banyak komunitas di wilayah gambut, tradisi dan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari pola hidup masyarakat. Kebiasaan ini sulit diubah tanpa pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran perlu melibatkan tokoh adat dan pemimpin masyarakat agar pesan perubahan lebih mudah diterima dan dijalankan. Penghormatan terhadap kearifan lokal dan pengintegrasian praktik tradisional dengan teknologi modern dapat meningkatkan tingkat partisipasi secara signifikan.

Faktor kelembagaan juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif lembaga desa, kelompok tani, dan organisasi masyarakat sipil dapat memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan warga. Kelembagaan yang kuat mampu memberikan pendampingan teknis, pengawasan bersama, serta mekanisme resolusi konflik yang seringkali muncul terkait pengelolaan lahan. Jika kelembagaan lokal lemah atau tidak berfungsi secara efektif, partisipasi masyarakat menjadi terfragmentasi dan program pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran sulit untuk berjalan optimal. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas kelembagaan lokal menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemudahan akses informasi juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi yang transparan dan mudah dipahami tentang dampak negatif pembakaran, manfaat pengelolaan lahan tanpa bakar, serta prosedur pelaksanaan program pengelolaan harus disebarluaskan

secara luas. Media komunikasi seperti penyuluhan langsung, media sosial, serta kampanye lingkungan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan efektif. Masyarakat yang memperoleh informasi lengkap dan terpercaya akan lebih cenderung untuk mengambil bagian dalam upaya pelestarian gambut, sementara kurangnya informasi dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan resistensi terhadap perubahan.

Selain faktor-faktor di atas, kondisi sosial dan politik lokal juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengelola lingkungan sangat menentukan tingkat keterlibatan mereka. Jika ada rasa skeptisisme atau ketidakpercayaan akibat pengalaman buruk sebelumnya, seperti janji-janji yang tidak terpenuhi atau penegakan hukum yang tidak konsisten, maka partisipasi masyarakat dapat menurun drastis. Sebaliknya, keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam pengambilan keputusan dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Oleh sebab itu, upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam konteks pengelolaan lahan gambut.

Faktor motivasi individu juga berperan dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Motivasi ini dapat berupa harapan memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan pendapatan atau kualitas hidup, maupun motivasi yang bersifat sosial dan emosional, seperti rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan keinginan menjaga warisan alam untuk generasi mendatang. Penghargaan dan pengakuan dari pemerintah atau lembaga terkait terhadap kontribusi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut juga dapat menjadi pendorong kuat agar partisipasi terus terjaga. Dengan memperhatikan berbagai faktor ini secara holistik, program pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif dengan dukungan penuh dari masyarakat.

### **Efektivitas Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat**

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan gambut merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Efektivitas kolaborasi ini sangat tergantung pada sejauh mana kedua pihak mampu membangun komunikasi yang baik, saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pencegahan kebakaran. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan regulasi dan sumber daya perlu menginisiasi dan mengorganisasi langkah-langkah strategis, sementara masyarakat sebagai pemilik dan pengelola lahan secara langsung harus dilibatkan aktif sebagai pelaksana utama di lapangan. Sinergi antara keduanya menjadi kunci utama agar upaya pencegahan kebakaran dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu indikator efektivitas kolaborasi adalah adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat, misalnya melalui pembentukan forum komunikasi desa, kelompok sadar api (fire care community), dan tim patroli bersama. Melalui mekanisme ini, peran masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi dalam pengawasan dan mitigasi risiko kebakaran. Pemerintah menyediakan pelatihan, alat pendukung, serta fasilitasi logistik yang dibutuhkan, sementara masyarakat menjalankan tugas pengawasan dan respons cepat jika terjadi titik api. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus mempercepat deteksi dini dan penanganan kebakaran sebelum meluas, sehingga menurunkan potensi kerusakan ekosistem gambut.

Namun, efektivitas kolaborasi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat untuk terbuka dalam berbagi informasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan akibat pengalaman negatif, seperti kurangnya transparansi atau penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pembakaran, maka partisipasi masyarakat dapat menurun dan kolaborasi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun hubungan yang transparan dan responsif dengan masyarakat, termasuk dalam penanganan keluhan dan tindak lanjut laporan kebakaran, agar sinergi yang tercipta benar-benar memberikan hasil positif.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas di lapangan sering menjadi hambatan dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Di banyak wilayah gambut, akses terhadap alat pemadam

kebakaran, sarana komunikasi, dan dukungan teknis masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit menjalankan peran aktif secara maksimal, terutama dalam situasi darurat kebakaran yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi intensif. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk masyarakat. Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis juga perlu diberikan agar kapasitas masyarakat terus meningkat sehingga kolaborasi berjalan lebih efektif.

Selain itu, keberhasilan kolaborasi juga dipengaruhi oleh keberagaman kepentingan dan peran aktor dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat gambut terdiri dari kelompok tani, masyarakat adat, pemilik usaha perkebunan, dan kelompok lain dengan prioritas yang berbeda-beda. Kolaborasi yang efektif mensyaratkan adanya keterlibatan inklusif dari seluruh elemen tersebut, sehingga kebijakan pencegahan kebakaran dapat diterima dan dijalankan secara kolektif. Pendekatan partisipatif yang mengakomodasi kepentingan beragam akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program pencegahan kebakaran yang dijalankan. Evaluasi secara berkala terhadap kolaborasi ini juga sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menilai capaian program, hambatan yang muncul, serta strategi yang perlu diperbaiki. Feedback dari masyarakat lapangan menjadi sangat berharga untuk melakukan adaptasi kebijakan dan teknis yang responsif terhadap kondisi riil. Selain itu, dokumentasi dan sharing pengalaman sukses dapat menjadi sumber pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas kolaborasi di masa mendatang. Tanpa evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang sudah terbangun berpotensi stagnan dan kehilangan momentum.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan gambut menunjukkan efektivitas yang tinggi ketika keduanya mampu membangun hubungan saling percaya, berbagi tanggung jawab, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, pemberi dukungan, dan pengarah yang mampu mengintegrasikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat harus dilibatkan sebagai pelaku aktif yang menjalankan peran pengawasan dan pencegahan di tingkat lokal. Dengan demikian, upaya pencegahan kebakaran lahan gambut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan hasil dari kerja sama kolektif yang memberikan manfaat nyata bagi pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dan Masyarakat**

Pelaksanaan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga ahli, maupun sarana dan prasarana pendukung. Pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan memerlukan investasi besar dalam bentuk teknologi, pelatihan, serta pengawasan lapangan yang intensif. Namun, anggaran pemerintah yang terbatas dan prioritas pembangunan lain sering kali menyebabkan program pengelolaan lahan gambut belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan tenaga teknis yang memahami karakteristik lahan gambut dan metode pengelolaan tanpa bakar juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi masyarakat, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Masyarakat lokal, khususnya petani dan pekebun, sering kali menggunakan cara tradisional membuka lahan dengan membakar karena dianggap lebih murah, cepat, dan praktis. Kurangnya akses terhadap informasi yang memadai dan edukasi lingkungan membuat mereka sulit untuk beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak memiliki alternatif nyata selain pembakaran.

Selain itu, aspek ekonomi menjadi faktor penghambat yang sangat nyata di lapangan. Pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran biasanya membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan cara konvensional. Masyarakat yang mayoritas hidup dari pengelolaan lahan dan hasil tani sering kali tidak mampu menanggung biaya tambahan untuk peralatan atau teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan. Kurangnya insentif ekonomi dan dukungan finansial dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk mengubah praktik yang sudah lama mereka jalankan.

Kendala sosial dan budaya juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Praktik pembakaran lahan sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun yang sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Perubahan budaya dan kebiasaan memerlukan proses panjang serta pendekatan yang sensitif terhadap norma dan nilai-nilai lokal. Apabila pemerintah tidak mampu melibatkan tokoh adat dan pemimpin masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi, upaya perubahan akan menghadapi resistensi. Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan ini menjadi kendala signifikan yang menghambat program pengelolaan tanpa pembakaran.

Dari segi kelembagaan, koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani pengelolaan lahan gambut masih sering menemui kendala birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Ketiadaan sinergi yang kuat antara instansi lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, dan penegak hukum menyebabkan program yang sudah direncanakan sulit terlaksana secara komprehensif. Hal ini juga mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, kelembagaan lokal di tingkat desa atau komunitas sering kali belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan mengawasi lahan gambut secara mandiri.

Kendala teknis juga cukup signifikan, terutama terkait dengan kondisi geografis dan hidrologis lahan gambut yang khas dan rawan. Lahan gambut yang basah dan berlumpur memerlukan teknik pengelolaan khusus agar tidak mudah terbakar, seperti sistem pengairan dan drainase yang terkontrol. Namun, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur semacam ini membutuhkan sumber daya yang besar dan kemampuan teknis yang tinggi. Apabila tidak dikelola dengan benar, upaya konservasi lahan gambut bisa gagal dan malah menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Permasalahan penegakan hukum juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Seringkali pelaku pembakaran lahan sulit untuk diidentifikasi dan dihukum karena lemahnya pengawasan di lapangan serta proses hukum yang panjang dan kompleks. Ketidakjelasan sanksi dan lemahnya tindakan preventif membuat pelanggaran terus berulang. Kondisi ini menurunkan kredibilitas pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan pembakaran pun menurun.

Kendala psikologis dan motivasi juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Masyarakat yang sudah lama menjalankan praktik pembakaran lahan cenderung merasa enggan untuk berubah karena takut kehilangan hasil panen atau pendapatan. Ketidakpastian terhadap keberlanjutan program dan jaminan dukungan pemerintah membuat masyarakat ragu untuk berinvestasi pada metode pengelolaan baru yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan jaminan, insentif, dan program pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat termotivasi dan yakin untuk berkomitmen dalam pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran.

“Ketua Dinas Lingkungan Hidup, Bapak [Syarif Usmulyono] telah memimpin upaya mobilisasi untuk menjaga lahan gambut di daerah kami. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa ‘Pengelolaan lahan gambut yang baik memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan swasta’ (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025). Beliau juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan gambut. Menurut Bapak [Syarif Usmulyono], ‘Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga lahan gambut, karena mereka yang paling dekat dengan lahan gambut dan dapat memantau kondisi lahan secara langsung’. Dengan demikian, upaya mobilisasi yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lahan gambut.

Dalam menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan gambut, beliau telah melakukan beberapa kegiatan seperti:

- Mengembangkan program penanaman pohon di lahan gambut
- Mengadakan pelatihan workshop tentang pengelolaan lahan gambut yang baik
- Menggalang dukungan dari masyarakat untuk menjaga lahan gambut

Karena dengan demikian dapat memastikan bahwa lahan gambut tetap lestari dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko kebakaran yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama

keberhasilan pengelolaan ini. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman dan motivasi masyarakat, hingga tantangan kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat agar pengelolaan lahan gambut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran, disarankan agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, program edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal perlu diperkuat guna mengubah budaya dan praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antar lembaga juga harus ditingkatkan untuk mencegah tindakan pembakaran secara efektif. Terakhir, insentif ekonomi dan jaminan keberlanjutan program diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berkomitmen dalam menjaga lahan gambut secara ramah lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arisanty, D., Hastuti, K. P., Aristin, N. F., Angriani, P., Alviawati, E., Adyatma, S., ... & Setiawan, F. A. (2024). *Geografi Ekonomi: Kajian Pada Lingkungan Lahan Basah*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Hariyadi, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan gambut di hutan lindung gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 2(1), 16-39.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Maryani, S. P., Rosita, S. P., Norhayani, S. P., Linda Wulandari, S. P., & Ir Evi Veronica, M. S. *Perairan Gambut Kalimantan Tengah Untuk Budidaya Ikan Patin (Pangasius sp.)*. Deepublish.
- Noor, M., & Sulaeman, Y. (2022). *Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Rawa: Kearifan Kebijakan dan Keberlanjutan*. UGM PRESS.
- Noor, M., Saputra, R. A., Wahdah, R., & Mulyawan, R. (2024). *Pengantar Lahan Basah Suboptimal Menuju Pertanian Berkelanjutan*. UGM PRESS.
- Notohadiprawiro, T., Maas, A., Amron, M., Sulaeman, Y., & Karolioneritas, V. (2022). *Tantangan Pengembangan Sumberdaya Lahan Rawa Dan Gambut*. Deepublish.
- Pohan, W. S., Syarifuddin, H., & Hamzah, H. (2023). Analisis Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Studi Kasus: Desa Seponjen dan Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 1018-1034.

- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Putri, T. T. A. (2017). Pengelolaan sumberdaya lahan gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat menuju lahan tanpa bakar. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*, 4(2), 92-109.
- Sawerah, S., Bakhtiar, A., Muljono, P., & Tjitropranoto, P. (2019). Sikap petani terhadap pengolahan lahan tanpa bakar sebagai salah satu upaya pencegahan kebakaran lahan gambut (kasus di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat). *Agriecobis*, 2(1), 14-22.
- Sawerah, S., Muljono, P., & Tjitropranoto, P. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 12(1).
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Tampubolon, J., Aluyah, C., & Heptiana, E. (2019). Persepsi masyarakat Desa Riding Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. *Sylva Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan*, 7(2), 49-57.
- Todaro, M. P. (1976). Internal migration in developing countries: A review of theory, evidence, methodology and research priorities. *International Labour Review*, 114(3), 297–317.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Uphoff, N. (1985). *Local institutional development: An analytical sourcebook with cases*. Kumarian Press.
- Utomo, I. M. (2016). *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*. Kencana.